



## ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUDUS

Elly Rosalina✉

Bank Mandiri, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2015

Disetujui Januari 2015

Dipublikasikan Februari 2015

*Keywords:*

*Sugar Production, Land*

*Area, Production of*

*Sugarcane, Yield of*

*Sugarcane*

### Abstrak

Kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Kudus sudah cukup besar, namun masih belum optimal dan bahkan kecenderungan menurun, sehingga perlu ditemukan permasalahannya dan dipecahkan agar tidak memberikan gangguan bagi penerimaan asli daerah dan kinerja pemerintahan Kabupaten Kudus. Variabel-variabel penelitian yaitu jumlah rumah sakit dan puskesmas, penerbitan KTP dan akta catatan sipil, jumlah kendaraan bermotor bersama-sama merupakan penyumbang bagi penerimaan retribusi daerah dalam bentuk pos pungutan retribusi daerah. Berdasarkan analisis dapat diperoleh hasil bahwa jumlah rumah sakit dan puskesmas memberikan kontribusi bagi pos retribusi pelayanan kesehatan dengan rata-rata sebesar 66,3% per tahun yang tumbuh cenderung meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 dan 2013, jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil memberikan kontribusi bagi pos retribusi ganti cetak KTP, KK dan akta catatan sipil dengan rata-rata sebesar 1,73% per tahun dengan pertumbuhan cenderung meningkat dari tahun 2001 hingga 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 hingga 2013, jumlah kendaraan diproyeksikan oleh pos penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat parkir dan retribusi ijin trayek dengan rata-rata sebesar 7,62% per tahun dengan pertumbuhan rata-rata 20% pertahun.

### Abstract

*Retribution income in Kudus gives a big contribution into government self-income, but in the last years the retribution income of Kudus region is not significant and it tends to attenuate. Considering to this current background, it is necessary to ascertain and solve the issues, particularly in order to bear the governmental self-income and disrupt to the work of the regional government of Kudus. The research variables are the number of hospital and puskesmas, the number of civilian registration and the number of vehicle. These variables in the research are indirect part factors and as together give contribution to retribution income with other retribution item. Based on the analysis, it indicates that the number of hospitals and puskesmas contribute to the income retribution in the average of 66.3% per year and it increases significantly from 2001 to 2011 and it tends to decrease in 2012 to 2013; numbers of ID cards and civilian registrations contributes to the civilian agency retribution in average of 1.73% per year and it increases significantly from 2001 to 2008 and it tends to decrease in 2009 to 2013; numbers of vehicles projected by retribution income agency of parking retribution, test drive retribution, terminal retribution, and vehicle route license retribution, contributes to the income retribution in average of 7.62% per year and the growth is 20% average per year.*

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pajak yaitu pajak properti yang menghasilkan pendapatan yang stabil terlepas dari pergerakan harga di pasar real estate (Ihlanfeldt & Willardsen, 2014). Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memegang peran penting pada pembentukan sumber pendapatan asli daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan retribusi yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, retribusi daerah mempunyai beberapa kemampuan strategis yang mencerminkan manfaat dari retribusi itu sendiri dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun dibandingkan dengan perkembangan penerimaan pajak daerah yang terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena pendapatan pajak lokal telah didorong oleh resesi ekonomi secara umum (Lutz et al., 2011). Peningkatan kegiatan pasar saham juga memungkinkan meningkatkan pengumpulan penerimaan pajak langsung (Taha et al., 2013). penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kudus mengindikasikan masih belum optimal dan bahkan terdapat kecenderungan menurun khususnya pada dua tahun terakhir. Menurunnya penerimaan retribusi daerah perlu segera ditemukan permasalahannya dan dipecahkan agar tidak memberikan gangguan bagi penerimaan asli daerah yang pada akhirnya akan memberikan gangguan terhadap kinerja pemerintahan pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus pada umumnya. Berikut tabel penerimaan retribusi daerah dan penerimaan PAD Kudus tahun 2001-2013.

**Tabel 1.1** Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Kudus  
Tahun Anggaran 2001-2013.

No	Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Persentase Kontribusi
1	2001	15.730.174.900	22.124.963.856	71,10 %
2	2002	20.544.778.662	30.854.712.732	66,59 %
3	2003	21.793.712.465	38.862.865.711	56,08%
4	2004	25.854.385.705	42.728.050.000	60,51%
5	2005	27.706.905.403	43.696.076.749	63,41 %
6	2006	27.348.731.168	51.311.619.700	56,52 %
7	2007	33.851.727.205	55.259.500.000	61,26 %
8	2008	41.786.019.829	71.520.070.000	58,43 %
9	2009	46.867.066.935	83.046.980.000	56,45 %
10	2010	55.626.646.110	94.032.740.000	59,15 %
11	2011	54.592.843.519	108.458.830.000	50,34 %
12	2012	13.865.924.782	121.017.030.000	11,46 %
13	2013	13.246.771.446	144.967.592.035	10,75 %

Sumber : Data penelitian diolah, tahun 2014.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat dilihat tingginya persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 walaupun mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara rata-rata mencapai lebih dari 50 persen, namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 dan 2013 menunjukkan penurunan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yang sangat drastis

hingga hanya mencapai 10,75 persen. Faktor memberikan pengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah jika dikaitkan dengan objek yang dikenai retribusi oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kontribusi jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah penerbitan KTP dan akte catatan sipil dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan retribusi daerah

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2001 – 2013.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:67). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasari dengan diberlakukannya UU. No 32 Tahun 2004 telah membawa implikasi kepada Pemerintahan daerah di dalam penyelenggaraan tugas daerahnya yang dibiayai atas beban APBD. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan kepada keuangan daerah karena dengan pemberlakuan desentralisasi maka peranan dan sumbangan dari pemerintah pusat berkurang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka didalam pemerintahan daerah diperlukan kesiapan dana yang relatif cukup besar. Salah satu komponen yang diharapkan mampu untuk digali potensinya adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian lain BUMD dan Penerimaan lain-lain PAD yang sah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif persentase menggunakan data sekunder dengan jenis data kurun waktu (time

series) selama kurun waktu 2001-2013. Dengan data yang digunakan bersumber dari Laporan Keuangan Kabupaten Kudus, Kudus Dalam Angka, Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian.

### Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah yang dimaksud adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dalam penelitian ini merupakan akumulasi penerimaan yang berasal dari pungutan retribusi daerah Kabupaten Kudus tiap tahun anggaran dalam satuan rupiah

#### 2. Faktor yang diduga memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah terdiri dari :

##### a. Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas adalah penghitungan tempat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang dimiliki oleh kabupaten Kudus dan diukur dengan satuan jumlah yaitu unit dan diproyeksikan oleh pos pungutan retribusi pelayanan kesehatan.

##### b. Jumlah Penerbitan Akta Catatan Sipil

Penerbitan Akta Catatan Sipil adalah akumulasi jumlah akte catatan sipil yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang meliputi jumlah lembar KK, lembar KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengangkatan anak.

##### c. Jumlah Kendaraan

Jumlah Kendaraan adalah jumlah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Penetapan jumlah kendaraan bermotor dibatasi pada pengertian di atas dengan

pengecualian pada kendaraan bermotor yang dimiliki oleh TNI/Polri serta kendaraan dinas pemerintah dan diukur dengan satuan jumlah berupa unit.

### Metode Analisis Data

Sebelum melaksanakan analisis data dilakukan uji kualitas data didasarkan pada validitas dan reliabilitas data dari dokumen yang diperoleh. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini maka validitas dan reliabilitas data tidak diragukan lagi karena data diperoleh dari laporan keuangan daerah Kabupaten Kudus yang terhimpun dalam laporan tahunan Kudus dalam Angka selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2013.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif atau alat analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika atau model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian (Hasan, 2002:28).

Untuk mengukur pertumbuhan variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah penerbitan KTP dan akte catatan sipil dan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2001 sampai dengan 2013 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pertumbuhan = Di mana

:

Pr th n : Data variabel penelitian tahun n

Pr th n -1 : Data variabel tahun sebelumnya

Pertumbuhan: Pertumbuhan variabel penelitian

Untuk mengetahui kontribusi variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas, jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil serta jumlah kendaraan terhadap penerimaan retribusi daerah dilakukan perbandingan antar masing-masing variabel dengan penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu penelitian dan dihitung dalam persentase sebagai berikut :

Kontribusi variable

Di mana :

P R Var th n : Penerimaan retribusi

variabel tahun n

P RD th n :Penerimaan retribusi

daerah tahun.n

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan dibahas adalah analisis deskriptif terhadap faktor jumlah rumah sakit dan puskesmas, faktor jumlah penerbitan akta catatan sipil, dan faktor jumlah kendaraan dan penerimaan retribusi daerah.

Berdasarkan data penelitian yang diteliti berturut-turut selama 2001-2013 dapat disimpulkan jumlah terkecil, jumlah terbesar, dan rata-rata tiap faktor penelitian. Pada variabel penerimaan retribusi daerah memiliki nilai minimum sebesar 13.246.771.446 yaitu pada tahun 2013. Sedangkan nilai maksimumnya adalah penerimaan retribusi daerah pada laporan keuangan tahun 2010 sebesar 55.626.646.110. Rata-rata tingkat penerimaan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Kudus selama kurun waktu penelitian dari tahun 2001 sampai dengan 2013 adalah sebesar 30.678.137.548. Faktor jumlah rumah sakit dan puskesmas terendah pada tahun 2003 dan 2004 sebanyak 88 unit dan tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 156 unit. Faktor Jumlah KTP dan akta catatan sipil terendah pada tahun 2004 sebesar 64.522 lembar dan terbesar pada tahun 2010 sebesar 115.928 lembar dengan rata-rata pertahun sebesar 83.308 lembar. Faktor jumlah kendaraan terendah pada tahun 2001 sebesar 96.639 unit dan terbesar pada tahun 2013 sebesar 384.390 unit dengan rata-rata pertahun sebesar 214.381 unit.

#### Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas

Perkembangan jumlah rumah sakit dan Puskesmas menunjukkan perkembangan yang nyata pada tahun 2012 dan 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 ke bawah. Namun selama 11 tahun sebelumnya perkembangannya sangat sedikit bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2002 sampai dengan 2004 dari 128 unit menjadi 91 unit dan turun lagi menjadi 88 unit pada tahun 2003. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh pula bagi penerimaan retribusi dalam bidang pelayanan kesehatan.

#### Analisis Perkembangan Jumlah Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil

Variabel jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil berdasarkan sumber data terdiri dari

penggantian cetak biaya KTP, KK dan akta lain. Selama 13 tahun sejak diberlakukannya otonomi daerah, penerbitan akta catatan sipil mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2001 ke tahun 2002 sebesar 54,85% dan meningkat lagi pada 2003 sebesar 43,44%, namun mengalami penurunan pada tahun 2004 hingga tahun 2006 sementara pada tahun 2010 ke 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan yang pesat. Peningkatan tersebut diduga karena meningkatnya permintaan akan penerbitan KK dan KTP baru oleh masyarakat sehubungan dengan adanya penghapusan pungutan biaya atas ganti cetak kartu keluarga dan KTP.

Namun dengan diberlakukan ketentuan penghapusan pungutan biaya atas pencetakan KTP dan KK sehingga penerimaan retribusi dari pos tersebut tidak lagi ada. Hal tersebut mengakibatkan turunnya jumlah penerimaan retribusi dari ganti cetak KTP dan akta catatan sipil.

#### **Jumlah Kendaraan**

Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Kudus yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan secara jumlah dan persentasenya. Peningkatan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2002 ke 2003 yaitu sebesar 0,73% dan tahun 2009 ke 2010 sebesar 0,94%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2003-2004 sebesar 33,71% dan rata-rata peningkatan persentase jumlah kendaraan adalah sebesar 9,64% per tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penerimaan retribusi daerah karena dengan melihat pada jumlah kendaraan tentu akan memberikan peluang untuk pemungutan retribusi misalnya pada retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi ijin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

#### **Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi berdasarkan Variabel**

Faktor jumlah rumah sakit dan puskesmas memberikan kontribusi nyata terhadap pos penerimaan retribusi pelayanan kesehatan daerah meliputi pungutan retribusi dari Puskesmas, retribusi pemeriksaan kesehatan, kapitasi/ASKES dan retribusi

terhadap rumah sakit swadana. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang disumbangkan oleh rumah sakit dan puskesmas menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh selisih penerimaan. Selisih penerimaan menunjukkan dinamika yang naik turun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Namun pada tahun 2006 mulai menunjukkan peningkatan yang cukup besar hingga tahun 2010 walaupun pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2011 selisih menunjukkan penurunan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang sangat tajam bahkan mencapai lebih dari 40 milyar hingga tahun 2013. Hal ini diduga karena adanya penerapan kebijakan dan penetapan peraturan perundang-undang yang menghapuskan beberapa pos pungutan retribusi yang termasuk dalam pungutan retribusi pelayanan kesehatan.

Faktor jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil memberikan sumbangan bagi pos penerimaan retribusi Penggantian biaya cetak KTP, KK dan capil. Selisih penerimaan retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK dan capil dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika yang naik turun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, namun pada tahun 2009 mulai terjadi penurunan yang terus menerus hingga tahun 2013. Penurunan yang mulai terjadi pada tahun 2009 tersebut menunjukkan penerimaan yang tadinya mencapai satu milyar lebih pada tahun 2008 turun hingga hanya mencapai 200 juta lebih pada tahun 2009 dan terus menurun hingga hanya 15 juta lebih pada tahun 2013.

Penurunan penerimaan adalah akibat pemberlakuan peraturan daerah yang menghapuskan pungutan retribusi dari pembuatan KTP dan Kartu Keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa pungutan retribusi didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000. Penerimaan pos-pos retribusi yang berhubungan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Kudus menunjukkan perubahan dari

tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh selisih penerimaan.

### Analisis Kontribusi

Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang didukung oleh jumlah rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 dengan rata-rata peningkatan mencapai 14,4%. Perbedaan penerimaan dari pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 tersebut dapat dikatakan menunjukkan dinamika yang meningkat. Namun pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan penurunan yang cukup drastis dari kontribusi mencapai lebih dari 79% menjadi 18,71%. Hal tersebut sangat jelas memangkas sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada publik di Kabupaten Kudus.

Penerimaan retribusi ganti cetak KTP dan akta catatan sipil yang disumbang oleh jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil di Kabupaten Kudus menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dengan rata-rata peningkatan mencapai 10,9%. Namun kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kudus hanya menunjukkan prosentase rata-rata sebesar 2,7% atau dapat dikatakan kecil bagi keseluruhan penerimaan retribusi daerah. Pada tahun 2009 persentase kontribusi yang berkaitan dengan pos retribusi ganti cetak KTP dan akta capil semakin kecil seiring dengan diberlakukannya peraturan yang menghapuskan pungutan terhadap pembuatan KTP dan KK.

Besar persentase kontribusi retribusi yang dipungut dari pos-pos pungutan yang berhubungan dengan jumlah kendaraan terhadap penerimaan retribusi dari tahun 2001 sampai 2011 berkisar dari 4,39% sampai dengan 6,82%. Apabila dilihat pada tahun 2012 persentase kontribusi yang dipungut dari pos-pos pungutan yang berhubungan dengan jumlah kendaraan kepada retribusi daerah sebesar 17,94% tetapi pada tahun tersebut penerimaan retribusi turun drastis dari 54 milyar lebih menjadi 13 milyar lebih dan pada tahun 2013

juga sama sehingga seolah-olah kontribusi pungutan yang berhubungan dengan jumlah kendaraan naik persentasenya.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu Variabel jumlah rumah sakit dan puskesmas memberikan dukungan terhadap pos pungutan retribusi pelayanan kesehatan dan kontribusi pada penerimaan retribusi daerah yang tumbuh cenderung meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 dan 2013, secara rata-rata kontribusinya sebesar 66,3% terhadap penerimaan retribusi daerah.

Variabel jumlah penerbitan KTP dan akta catatan sipil memberikan dukungan bagi pos retribusi ganti cetak KTP dan akta catatan sipil dan tumbuh dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2001 hingga 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 hingga 2013, rata-rata kontribusi terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kudus tahun 2001-2013 sebesar 1,73%.

Variabel jumlah kendaraan memberikan dukungan bagi pos pungutan retribusi yang berhubungan dengan jumlah kendaraan seperti retribusi parker di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi tempat parkir dan retribusi ijin trayek dengan kecenderungan meningkat pertumbuhannya dengan rata-rata 20% pertahun. Kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kudus tahun 2001-2013 dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,62% setahun.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, sebagai berikut : (1) Pemerintah Kabupaten Kudus hendaknya meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan menyesuaikan target dan potensi dari objek retribusi yang dimiliki daerah Kabupaten Kudus. (2) Pemerintah Kabupaten Kudus hendaknya lebih intensif dalam pengelolaan pungutan retribusi daerah dengan melakukan pengawasan dan audit. (3) Perlunya dibuat aturan yang memuat sanksi yang tegas terhadap pemungut retribusi dan wajib retribusi

yang tidak menjalankan peraturan daerah khususnya berkaitan dengan pungutan retribusi

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus, Santosa. 1995. *Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman*, Prisma, Nomor 4 Tahun XXIV, LP3ES Indonesia.
- Darwanto dan Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Darah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Ekalaya, 2005. *Analisis Kebijakan Tarif dan Potensi Retribusi Tempat Penginapan Studi Kasus Graha Wisata Kuningan* [tesis]. FE UI, Jakarta
- Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gujarati, 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN
- Hasan, 2002. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ihlanfeldt, K. R. & Willardsen, K., 2014. The millage rate offset and property tax revenue stability. *Regional Science and Urban Economics*, May, Volume 46, pp. 167-176
- Kaho, Josep Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Penerbit Rajawali Press, Jakarta
- Kantor Statistik Kabupaten Kudus. *Berbagai Tahun, Kabupaten Kudus dalam Angka*, Kudus
- Kawedar. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Undip
- Lutz, B., Molloy, R. & Shan, H., 2011. The housing crisis and state and local government tax revenue: Five channels. *Regional Science and Urban Economics*, July, 41(4), pp. 306-319.
- Mulyanto. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Provinsi Jawa Tengah* [tesis]. FE UI, Jakarta
- Nuringsih. 2006. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)* [Tesis]. FE UI, Jakarta
- Prakosa, B, Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jogjakarta : UII PRESS.
- Purbayu dan Retno. 2002. *Pengeluaran Pembangunan, Jumlah Penduduk, PDRB dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol 2. No. 1/ Juli 2005.
- Santoso. 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sari. 2006. *Analisis Data Panel Peranan Retribusi Daerah Dalam APBD Kabupaten dan Kota Se-Indonesia pada tahun 2001-2003*. Jakarta Skripsi FE UI.
- Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Edisi ke-3. Jakarta : Salemba Empat.
- Soedarsono. 1971. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, N.V. Eresco, Bandung
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. Andi Offset
- Taha, R., Colombage, S. R., Maslyuk, S. & Nanthakumar, L., 2013. Does financial system activity affect tax revenue in Malaysia? Bounds testing and causality approach. *Journal of Asian Economics*, February, Volume 24, pp. 147-157
- Yani. 2002. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor* [skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- UU. Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Daerah*.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.